DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hartoyo. (2020). Komunikasi Polisi dan Masyarakat dalam Menangani Tindak Kekerasan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, D. (2019). Koordinasi Antarinstansi Keamanan dalam Penanganan Kasus Kekerasan. Yogyakarta: Genta Press.
- Setiawan, R. (2022). *Penyidikan dan Penyelidikan Tindak Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. (2021). *Hukum Pembuktian Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sudibyo, S. (2019). *Kemiskinan dan Kekerasan terhadap Aparat Penegak Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Widyanto, A. (2020). *Budaya Kekerasan dalam Masyarakat Indonesia*. Malang: UB Press.

B. Jurnal

- Sari, M. (2022). Pendekatan Psikologis dalam Pemeriksaan Korban Tindak Pidana Penganiayaan Aparat. *Jurnal Psikologi Hukum*, 4(1), 88–104.
- Suhartono, A. (2021). Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(1), 45–60.
- Sutanto, B. (2018). Dampak Penganiayaan terhadap Kinerja Polisi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 223–237.
- Wahyuni, S. (2019). Penurunan Motivasi Korban Penganiayaan di Lingkungan Kepolisian. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 7(1), 65–77.
- Wahyuni, S. (2020). Tantangan Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 250–263.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

D. Website, Laporan, dan Data

Data Polri tahun 2018–2020.

Komnas HAM. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2023*. Jakarta: Komnas HAM.

"Polri Kembangkan Digital Evidence Management System," detik.com, 2024.

Data Implementasi Bodycam Polri, Kompas.com, 2023.

E. Sumber Lain (Putusan/Yurisprudensi)

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 34/Pid.B/2021/PN Bgl.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 86/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016.

Dokumen Internal Polres Kepahiang Tahun 2024–2025 (Analisis Penanganan Kasus Penganiayaan Anggota Polri).

Hasil Observasi Penulis, Unit Reskrim Polres Kepahiang, 2025.

Wawancara dengan Penyidik Polres Kepahiang, Juli 2025.

Hasil Notulensi Forum Koordinasi Penyidik Digital, Polres dan Polda Bengkulu, 2025.

F. Sumber Perbandingan Internasional

Police Act Malaysia.

Republic Act No. 6975 (Philippines).

Criminal Procedure Code (CPC) Singapore.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI





